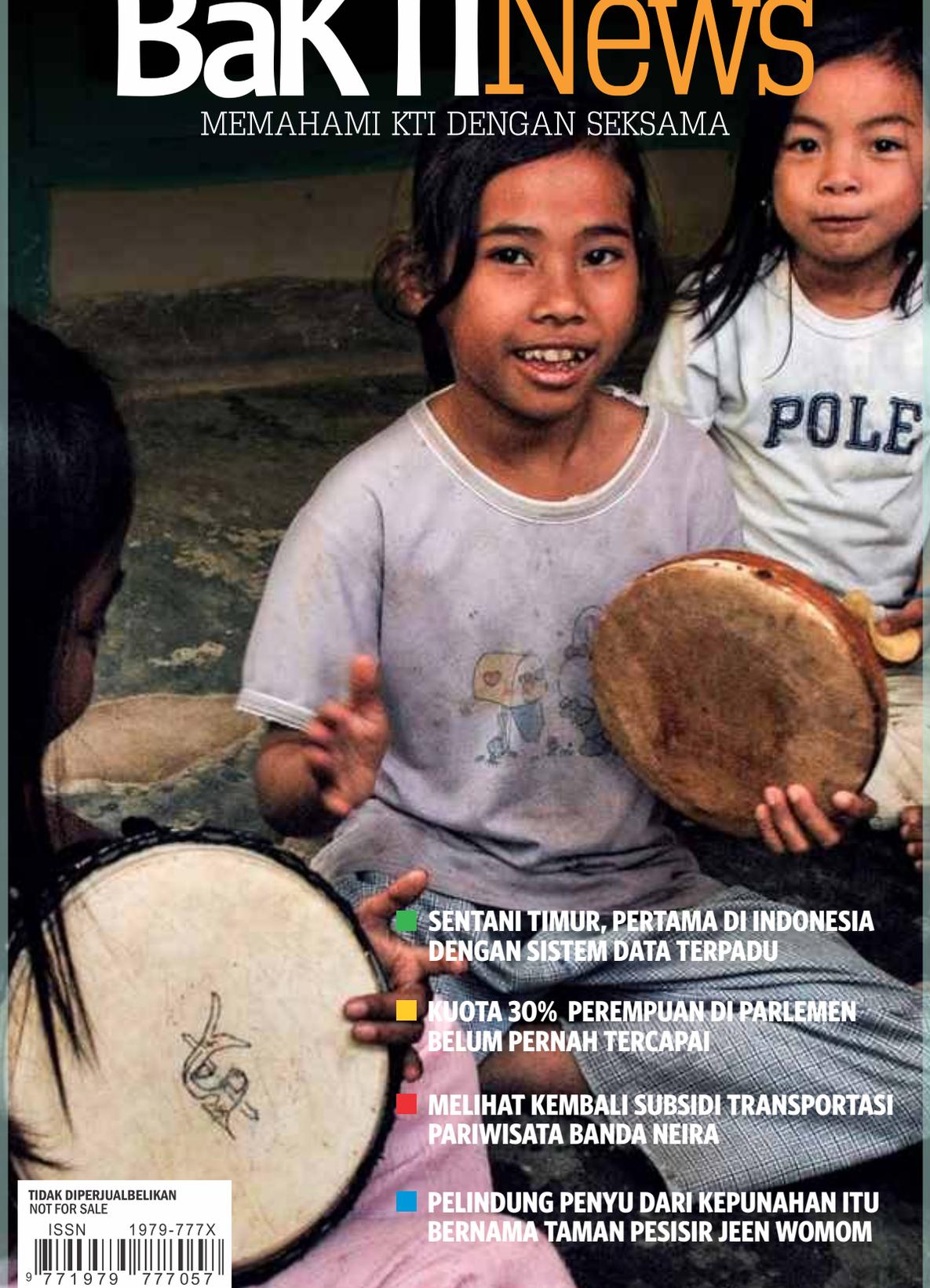


No. 145 Februari - Maret 2018

BaKTI**News**

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

- 
- **SENTANI TIMUR, PERTAMA DI INDONESIA DENGAN SISTEM DATA TERPADU**
 - **KUOTA 30% PEREMPUAN DI PARLEMEN BELUM PERNAH TERCAPAI**
 - **MELIHAT KEMBALI SUBSIDI TRANSPORTASI PARIWISATA BANDA NEIRA**
 - **PELINDUNG PENYU DARI KEPUNAHAN ITU BERNAMA TAMAN PESISIR JEEN WOMOM**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 7771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor **M. YUSRAN LAITUPA**
VICTORIA NGANTUNG
ITA MASITA IBNU

Suara Forum KTI **ZUSANNA GOSAL**

Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**

Database
Kontak **INDINA ISBACH**

Design & layout
Editor Foto **FRANS GOSALI**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTI News

Februari - Maret 2018

No. 145

- 1** Kajian Tipologi Kemiskinan (Bagian 1)
Oleh **AGUSSALIM**
- 5** Sentani Timur, Pertama di Indonesia dengan Sistem Data Terpadu
Oleh **N.J. TANGKEPAYUNG**
- 9** Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai
Oleh **SCHOLASTICA GERINTYA**
- 13** Bagaimana Dongkrak Keterwakilan Perempuan di DPR ?
Oleh **ELLA S. PRIHATINI**
- 17** Langkah Awal Menguraikan Masalah Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro
Oleh **DJADJAT SUDRADJAT**
- 20** Badan Musyawarah Kampung Papua
Oleh **HERACLES LANG**
- 24** Bamuskam dan Pengembangan Ekonomi Kampung Asei Besar
- 25** Melihat Kembali Subsidi Transportasi Pariwisata Banda Neira
Oleh **KAMARUDDIN AZIS**
- 29** Aplikasi Beras Fortifikasi Berbasis Kawasan Pinggir Hutan di Lombok Timur
Oleh **HERMAN RAKHA**
- 31** Pelindung Penyu dari Kepunahan itu Bernama Taman Pesisir Jeen Womom
Oleh **M. AMBARI**
- 37** Petani & Pemangku Kepentingan Bersama Membahas Solusi Keberlanjutan Rumput Laut Melalui Koperasi
Farmers & Officials Discuss Sustainable Seaweed Solutions Through Co-operatives
Oleh **HERLIANI**
- 39** Batukarinfo
- 41** Info Buku
- Foto Cover: Doc. Yayasan BaKTI

Kajian Tipologi Kemiskinan

(Bagian 1)

Oleh **AGUSSALIM**

Jumlah penduduk miskin bergerak naik dari 198.420 jiwa (Maret 2011) menjadi 205.374 jiwa enam tahun kemudian (Maret 2017) atau meningkat 3,50 persen.





Ilustrasi : FG



aat ini Provinsi Gorontalo tengah menghadapi dua tantangan terkait persoalan kemiskinan. Tantangan pertama tingkat kemiskinan yang masih relatif

tinggi dan tantangan kedua penurunan angka kemiskinan yang berjalan lambat. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo mencapai 17,65 persen (Maret 2017) yang menempatkan provinsi ini pada urutan kelima dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara Nasional, setelah Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Meskipun penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo menunjukkan kecenderungan yang positif, namun penurunannya tidak cukup akseleratif, bahkan cenderung stagnan, terutama dalam enam tahun terakhir. Selama kurun waktu 2011-2017, penurunan persentase penduduk miskin hanya bergerak dari 18,75 persen (Maret 2011) menjadi 17,65 persen (Maret 2017), yang menyebabkan posisi relatifnya secara Nasional tidak mengalami perubahan.

Meskipun persentase penduduk miskin tampak mengalami penurunan tipis, namun secara absolut jumlah penduduk miskin justru menunjukkan peningkatan. Jumlah penduduk miskin bergerak naik dari 198.420 jiwa (Maret 2011) menjadi 205.374 jiwa enam tahun kemudian (Maret 2017) atau meningkat 3,50 persen. Penurunan persentase penduduk miskin di satu sisi dan peningkatan jumlah penduduk miskin di sisi lain, menjelaskan bahwa populasi penduduk non-miskin bertambah lebih cepat dibandingkan dengan



populasi penduduk miskin. Tentu saja, ini merupakan kecenderungan yang positif. Namun, bagaimanapun penambahan jumlah penduduk miskin sesungguhnya memberi tekanan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Oleh karena itu, kemiskinan harus tetap ditempatkan sebagai isu penting dalam desain perencanaan dan kebijakan pembangunan di daerah ini.

Mengurangi Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Fakta global memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah telah menghambat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang terjadi sejak tahun 2012, telah menyulitkan upaya penanggulangan kemiskinan di daerah ini. Sejak berdirinya provinsi ini pada tahun 2000, sebagai pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara, pertumbuhan ekonomi tertinggi yang bisa dicapai adalah 7,91 persen. Itu terjadi pada tahun 2012. Namun sejak saat itu, pertumbuhan

ekonomi terus melambat hingga 6,22 persen pada tahun 2015, yang merupakan angka terendah dalam 15 tahun terakhir. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh melambatnya sektor ekonomi yang selama ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo, seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran; dan sektor administrasi pemerintahan. Meski tahun 2016, pertumbuhan ekonomi sedikit menguat, namun belum sekuat periode sebelum tahun 2012.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2012 telah memberi dampak yang luas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka pengangguran cenderung meningkat dan angka kemiskinan bergerak naik. Pada tahun 2012, jumlah pengangguran sebanyak 20.344 orang dan meningkat menjadi 21.524 orang pada Maret 2017. Paralel dengan peningkatan jumlah pengangguran, jumlah penduduk miskin juga meningkat dari 186.440 orang pada Maret 2012 menjadi 205.374 orang



Foto : Riyau/GP

pada Maret 2017. Selain itu, proporsi penduduk miskin yang tidak bekerja di Provinsi Gorontalo, juga relatif sangat tinggi. Menurut data publikasi BPS, dari seluruh penduduk miskin yang berumur 15 tahun ke atas, sebesar 41,18 persen diantaranya tidak bekerja (termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja). Fakta-fakta ini yang menjelaskan mengapa angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih relatif tinggi dan sulit diturunkan ke level yang lebih rendah.

Namun fakta di atas setidaknya membuat semuanya tampak lebih jelas, bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi kuat dengan dinamika pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, untuk mengurangi pengangguran dan mereduksi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi harus diupayakan berada dikisaran 8 – 9 persen per tahun, dengan mendorong sektor-sektor yang selama ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran; dan sektor

konstruksi. Pada saat yang sama, sektor ekonomi yang diyakini memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang tinggi dan berdampak signifikan terhadap pengangguran dan kemiskinan, juga perlu terus dikembangkan, terutama sektor industri pengolahan yang selama ini cenderung stagnan.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga terkendala oleh keterbatasan fiskal (*fiscal space*) pemerintah Provinsi Gorontalo. Padahal karakteristik perekonomian Provinsi Gorontalo masih meniscayakan peran signifikan pemerintah sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Dalam lima tahun terakhir, secara rata-rata pemerintah Provinsi Gorontalo hanya memiliki belanja modal sekitar 19,16 persen dari total Belanja Daerah, dengan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2017, dari total Belanja Daerah sebesar Rp 1.831,69 miliar, yang dialokasikan untuk Belanja Modal hanya sebesar Rp 290,27 miliar atau 15,85 persen. Anggaran ini harus dialokasikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk OPD yang tidak terkait langsung dengan isu penanggulangan kemiskinan. Keterbatasan fiskal ini telah menjadi kendala utama dalam mengembangkan berbagai bentuk intervensi untuk menanggulangi kemiskinan di daerah ini. Oleh karena itu, ketepatan dalam pengalokasian anggaran, efisiensi dan efektifitas anggaran, harus sepenuhnya menjadi fokus perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo di hari-hari mendatang. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan Bappeda Provinsi Gorontalo dimana Penulis sebagai tenaga ahli. Penulis adalah Focal Point Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JIKTI)/Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penulis dapat dihubungi melalui email : agus_jero@yahoo.com



Sentani Timur, Pertama di Indonesia dengan Sistem Data Terpadu

Oleh **N. J. TANGKEPAYUNG**



Foto : N.J. Tangkepuyung/Yayasan BaKTI

meningkatkan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.

Distrik Sentani Timur di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua adalah distrik (kecamatan) pertama di Indonesia yang memiliki Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (SAID). Sistem ini adalah sistem informasi pertama yang merupakan konsolidasi dari Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) dan layanan kesehatan serta pendidikan dasar di satu distrik.

Acara Peluncuran SAID bertempat di Kantor Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura pada Hari Rabu, 22 November 2017. Peluncuran secara resmi dilakukan oleh *Minister Counsellor* Kedutaan Besar Australia Ibu Fleur Davies dan Pelaksana Harian (PLH) Bupati Jayapura, Drs. Yerry F. Dien, M.Si. dengan cara menyerahkan secara simbolis Dokumen SAID.

Terdapat tujuh Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) dari tujuh kampung yang menyusun Sistem Administrasi dan Informasi Distrik di Sentani Timur. Terhubung secara *on-line* dan *off-line* yang dapat diakses melalui www.sentanitimur.web.id. Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) sendiri adalah sistem administrasi dan informasi berbasis web yang berisi data kependudukan dan sosial ekonomi tiap individu dalam satu kampung.

Mengawali acara peluncuran, Kepala Distrik Sentani Timur Steven Ohee menyambut undangan yang hadir di halaman Kantor Distrik Sentani Timur, dengan memaparkan SAID Sentani Timur yang berisi basis data dari tujuh kampung, yaitu Kampung Ayapo, Nendali, Asei Kecil, Asei Besar, Nolokla, Puay, dan Yokiwa. "Data itu meliputi jumlah sekolah, tenaga guru, penyakit yang dominan, sarana dan prasarana, areal perkebunan, hingga jumlah ternak warga dan data demografi lainnya" kata Steven Ohee.

Dalam sambutannya, Plh Bupati Jayapura, Drs. Yerry F. Dien, M.Si mengatakan aplikasi SAIK dan SAID di Distrik Sentani Timur ini sebagai upaya perencanaan pembangunan di tingkat kampung dan distrik. Ini juga sebagai garda terdepan dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, yang apabila dilaksanakan dengan baik maka kehidupan masyarakat akan lebih baik. Lebih lanjut disampaikannya bahwa akan lebih baik apabila tersedianya data dari bawah

Data yang akurat, tersedia setiap saat adalah infrastruktur penting dalam penyusunan kebijakan untuk mendorong perencanaan pembangunan dan perbaikan kualitas layanan publik. Tersedianya data yang komprehensif akan mendukung pemerintah, termasuk pemerintah daerah setingkat distrik atau kecamatan untuk

PELUNCURAN SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI DISTRIK (SAID)

Data Akurat dan Terpercaya
untuk Pembangunan Papua yang Berkeadilan

KOMPAK adalah Kemitraan Pemerintah Australia

KOMPAK

yang akurat maka pemerintah kabupaten akan berkomitmen terkait upaya-upaya memberdayakan dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP).

Minister Counsellor Bidang Pembangunan Manusia Kedutaan Besar Australia, Fleur Davies menyampaikan, dengan adanya kemajuan dalam pengumpulan data guna menunjang tantangan pembangunan daerah. Kami berterima kasih kepada seluruh komponen yang telah ikut serta dalam program SAIK dan SAID ini. Lebih lanjut Fleur Davies mengatakan bahwa, SAIK sebagai alat yang efektif dalam merekam data di kampung untuk mengambil keputusan yang lebih baik seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan di kampung. Harapannya program SAIK dan SAID di Distrik Sentani Timur ini akan menjadi contoh bagi distrik lainnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kampung dan juga penanganan HIV&AIDS.

Agung Hikmat, Tenaga Ahli Kedepuitan II Kantor Staf Kepresidenan dalam sambutannya mengatakan Inisiatif ini selaras dengan upaya pembangunan infrastruktur penyusunan kebijakan berbasis bukti yang didorong oleh

Kantor Staf Presiden. Presiden Jokowi tak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur kebijakan. Karena itu, SAID akan menjadi penyedia data yang lengkap agar kebijakan pemerintah dapat tepat sasaran.

Turut hadir pada acara Peluncuran SAID di Distrik Sentani Timur ini Staf Ahli Bidang Pemerataan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Taufik Hanafi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dr. Khairul Lie, S.KM, M.Kes, Kepala Kesbangpol Kabupaten Jayapura Yanto Dago, SE dan Kapolsek Sentani Timur Iptu Lambertus L. Sattu, SH, serta sejumlah Kepala Distrik lainnya di Kabupaten Jayapura.

Melalui rangkaian pelatihan bagi kader kampung dan manajer data, kampung dilatih untuk mampu dan mandiri dalam mengumpulkan dan mengelola data kampung. Para kader kampung melakukan sensus dari rumah ke rumah di setiap kampung untuk mengumpulkan data penduduk yang kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi SAIK.

Sistem Administrasi dan Informasi Kampung ini dikelola sendiri oleh para kader kampung di ketujuh kampung Distrik Sentani Timur. SAIK



Foto : N.J. Tangkepuyung / Yayasan BaKTI

membantu pemerintahan kampung dalam menyediakan data kependudukan yang akurat, membantu menyediakan format surat-surat pemerintah kampung, menyediakan data akurat untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Pembangunan Tahunan. Dengan perencanaan yang berbasis data, program pembangunan kampung akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kampung.

Jika SAIK dikelola oleh kader pemberdayaan masyarakat kampung maka SAID dioperasikan oleh manager data di “Rumah Data” Kantor Distrik Sentani Timur. Sehari-harinya manager data juga didukung oleh kader kampung yang melakukan update data SAIK secara *online* maupun *offline* ke sistem SAID. Alur pengelolaan data pada SAID terdiri dari input data dari unit layanan (Puskesmas dan Pendidikan Dasar), Data Kampung di dalam SAIK dan data distrik yang kesemuanya dikompilasi di Rumah Data Kantor Distrik Sentani Timur.

Jessica Ohee, sebagai manajer data sehariannya bekerja bersama rekan-rekannya

kader kampung yang datang dari kampung-kampung di Distrik Sentani Timur untuk “mengantarkan data” atau melakukan *update* data ke dalam SAID. Menurutnya sebagai putri asli Sentani, dirinya dan teman-teman kader kampung memikul tanggung-jawab yang besar untuk menyediakan data yang terkini dan akurat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di kampung dan di Distrik Sentani Timur.

Tersedianya SAIK dan SAID adalah salah satu bentuk perwujudan dari kerjasama bilateral Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk pembangunan dalam mencapai target RPJMN 2015-2019, yang implementasinya di Provinsi Papua dan Papua Barat dilaksanakan oleh KOMPAK bekerjasama dengan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan Pemerintah Daerah serta mitra pembangunan lainnya. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui Program LANDASAN, Anda dapat menghubungi info@bakti.or.id

Kuota 30%

Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai

Oleh **SCHOLASTICA GERINTYA**

Dibandingkan dengan rata-rata dunia, proporsi wanita dalam parlemen di Indonesia masih jauh di bawahnya.

Indonesia menempati peringkat keenam di ASEAN terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Proporsi perempuan di parlemen Indonesia masih di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan negara lain di dunia.



Problema ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan Indonesia.

Berdasarkan data

Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Sayangnya, besarnya populasi perempuan tersebut tidak terepresentasi dalam parlemen. Proporsi perempuan di kursi DPR jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki.

Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik

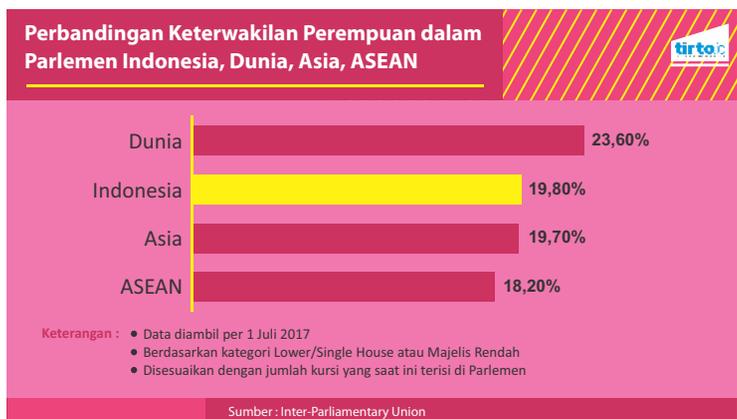
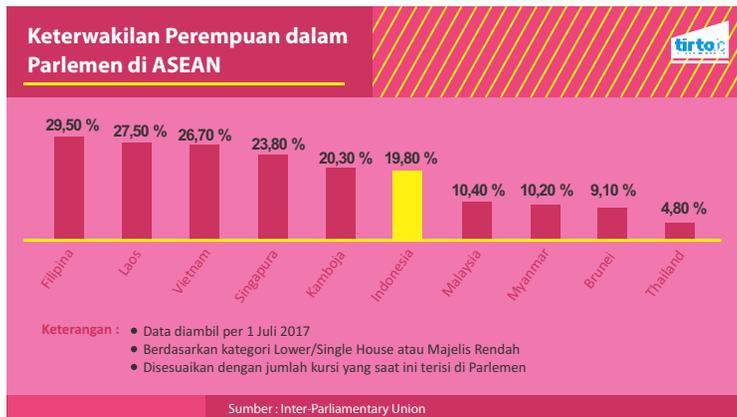
menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.

Kemudian, dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan *zipper system* yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

Di tingkat ASEAN, bersumber dari Inter-Parliamentary Union (IPU), dalam kategori Majelis Rendah, Indonesia menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan dalam parlemen. Proporsi perempuan yang berada di parlemen Indonesia berada di bawah 20 persen, tepatnya 19,8 persen.

Peringkat pertama diperoleh Filipina dengan angka sebesar 29,5 persen atau berjumlah 86 perempuan dari total 292 kursi. Di posisi kedua adalah Laos, sebesar 26,7 persen atau 41 perempuan dari 149 kursi di parlemen. Sedangkan, tempat ketiga diduduki oleh Vietnam dengan 26,7 persen perempuan dalam parlemen atau 132 kursi dari 494 total anggota parlemen.

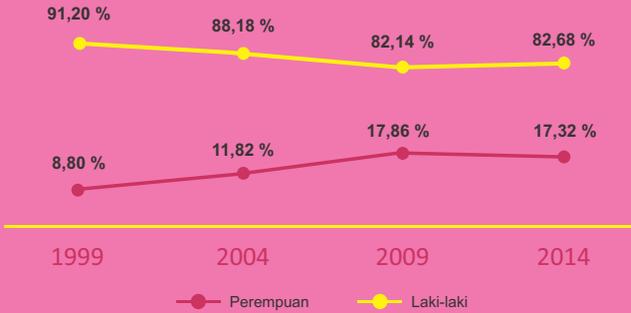


Bila dibandingkan dengan rata-rata dunia, proporsi wanita dalam parlemen di Indonesia masih jauh di bawahnya. Rata-rata dunia sebesar 23,6 persen wanita yang menduduki kursi di parlemen. Sedangkan, bila dibandingkan dengan negara Asia maupun ASEAN, posisi Indonesia berada di atasnya. Rata-rata proporsi perempuan dalam parlemen di negara Asia dan ASEAN masing-masing sebesar 19,7 persen dan 18,2 persen.

Semenjak pemilu 1999 hingga 2014, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI belum mencapai angka 30 persen. Namun, atas pengaruh kebijakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, proporsi keterwakilan perempuan di DPR menunjukkan tren meningkat.

Pada pemilu 1999, jumlah perempuan yang menduduki kursi di DPR sebanyak 44 orang atau 8,8 persen. Proporsi ini meningkat 47,7 persen menjadi 65 orang pada pemilu 2004 atau mendapatkan porsi sebesar 11,82 persen di DPR.

Perbandingan Keterwakilan Perempuan dan Laki-laki di DPR Berdasarkan Tahun Pemilihan Umum



Sumber : Statistik Indonesia

Jumlah Anggota DPR RI per Partai Politik Berdasarkan Jenis Kelamin



| Partai Politik | 2009-2014 | | 2014-2019 | |
|----------------|-----------|----|-----------|----|
| | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ |
| Nasdem | 0 | 0 | 31 | 4 |
| PKB | 21 | 7 | 37 | 10 |
| PKS | 54 | 3 | 39 | 1 |
| PDIP | 77 | 17 | 88 | 21 |
| Golkar | 88 | 18 | 75 | 16 |
| Gerindra | 22 | 4 | 62 | 11 |
| Demokrat | 113 | 35 | 48 | 13 |
| PAN | 39 | 7 | 40 | 9 |
| PPP | 33 | 5 | 29 | 10 |
| Hanura | 14 | 3 | 14 | 2 |

Sumber : KPU



Pada empat periode pemilu terakhir, keterwakilan perempuan tertinggi pada pemilu 2009, dengan proporsi sebesar 17,86 persen. Sayangnya, pada periode 2014-2019, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR turun menjadi sebanyak 97 orang atau 17,32 persen dari total anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang.

Bila ditelisik lebih dalam, setiap partai pemenang pemilu akan memiliki anggota DPR perempuan dengan jumlah lebih banyak dibandingkan partai lainnya. Pada pemilu 2009 yang dimenangkan oleh Partai Demokrat, jumlah anggota DPR perempuan yang berasal dari partai ini berjumlah 35 orang, sedangkan partai lainnya hanya berjumlah kurang dari 20 orang. Sementara pada periode 2014-2019, anggota DPR terbanyak berasal dari partai PDIP dengan jumlah 21 orang.

Di sisi lain, anggota DPR perempuan dengan jumlah paling sedikit selama dua periode tersebut berasal dari PKS. Pada 2009-2014, keterwakilan perempuan dari partai ini hanya 5,26 persen terhadap jumlah anggota DPR dari PKS. Sedangkan, periode 2014-2019, keterwakilan perempuan menurun menjadi 2,5 persen terhadap jumlah anggota PKS yang duduk di DPR.

Adanya penurunan jumlah perempuan di parlemen ini mungkin sekali terjadi karena adanya hambatan yang dialami calon legislatif perempuan dalam menjalankan pemilu. Hambatan tersebut misalnya masih kentalnya budaya patriarki yang seringkali mendiskriminasi perempuan, adanya beban berlapis yang ditanggung oleh perempuan di ruang privat dan ruang publik, dan adanya anggapan bahwa pendidikan dan kemampuan



politik perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Masih kurangnya representasi perempuan dalam parlemen dapat disiasati dengan penguatan dan peningkatan angka batas kuota dalam rangka meningkatkan kemungkinan keterpilihan perempuan. Selain itu, penguatan kebijakan terkait penempatan calon legislatif (caleg) perempuan pada nomor urut teratas dan penambahan caleg perempuan dalam daftar calon di semua Dapil. Tak hanya itu, perlu adanya sanksi tegas pada partai politik jika tidak memenuhi ketentuan penempatan caleg perempuan sebanyak kuota yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi penting, sebab UU Partai Politik dan Pemilu ini merupakan salah satu parameter dalam melihat respon negara terkait kesetaraan gender.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen

ini perlu menjadi perhatian penting. Lantaran kehadiran perempuan di parlemen memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender. Sebab seringkali anggota laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pengalaman dan kepentingan antara keduanya. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel dari tirto.id dan dapat dibaca pada link www.tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q.

Reporter: **Scholastica Gerintya**

Bagaimana Dongkrak Keterwakilan Perempuan di DPR ?

Oleh **ELLA S. PRIHATINI**

M

emasuki awal 2018, diskusi mengenai pemilihan umum (pemilu) Indonesia yang akan diselenggarakan tahun depan mulai mengemuka. Selain isu

calon presiden, tak kalah penting adalah calon-calon legislator (caleg) yang akan menjadi representasi rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat, dan keterwakilan perempuan dalam lembaga tersebut.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya penting dari aspek perimbangan antara laki-laki dan perempuan. Populasi Indonesia separuhnya berjenis kelamin perempuan. Namun lebih dari itu, kehadiran anggota parlemen perempuan diharapkan bisa menjamin kepentingan kaum perempuan menjadi salah satu prioritas kebijakan, di antaranya terkait dengan isu pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Angka keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke



tahun. Saat pemilu pertama kali digelar pada 1955, jumlah kursi perempuan hanya 5,06 persen, dan angka ini terus bertambah secara bertahap hingga mencapai 11,4 persen pada 1997 (KPU 2014).

Selepas rezim Orde Baru, berbagai reformasi hukum terkait dengan pemilu legislatif mengenalkan sistem kuota gender yang bertujuan membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk terpilih.

Namun, melihat pengalaman tiga siklus pemilu yakni 2004, 2009, dan 2014, kuota gender yang mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan sedikitnya 30 persen di daftar calon tetap (DCT) belum mendongkrak keterpilihan perempuan secara signifikan.

Pada 2004, perempuan hanya meraih 11,24 persen kursi di DPR. Pada pemilu lima tahun kemudian jumlahnya naik menjadi 18,21 persen. Sementara pada 2014 keterwakilan perempuan justru menipis menjadi 17 persen. Secara umum, jumlah caleg perempuan dari tujuh partai yang bersaing di tiga pemilu legislatif terus meningkat. Namun mengapa jumlah perempuan yang terpilih tidak bisa meningkat secara maksimal?

Dalam bukunya yang mengulas rekrutmen

politik Pippa Norris dan Ronald Inglehart menawarkan tiga tingkat analisis: faktor sistematis, faktor partai, dan individu calon legislatif.

Undang-undang Pemilu, sistem partai, dan sistem hukum di sebuah negara termasuk dalam kategori faktor sistematis. Sementara faktor partai politik meliputi ideologi dan aturan internal partai dalam mencalonkan perempuan sebagai anggota legislatif. Faktor terakhir terkait dengan aspek motivasi dan sumber daya individu orang yang akan menjadi caleg.

Dalam tulisan ini, analisis saya akan fokus pada faktor partai politik dalam menominasikan caleg perempuan. Hal yang bisa diukur adalah tren penempatan caleg perempuan di nomor urut satu dan tingkat keterpilihan caleg perempuan yang berada di nomor urut teratas.

Analisis statistik dari data hasil pemilu menunjukkan, mayoritas caleg yang berhasil melenggang ke Senayan adalah mereka yang dinominasikan pada nomor urut satu.

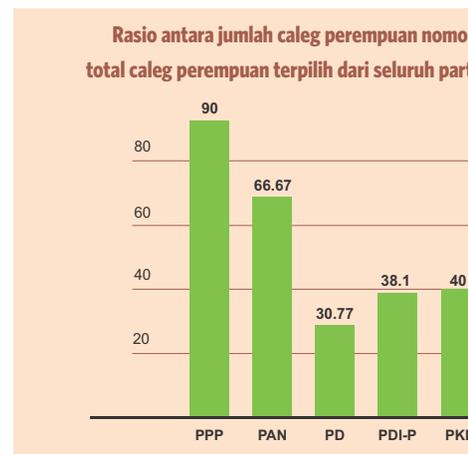
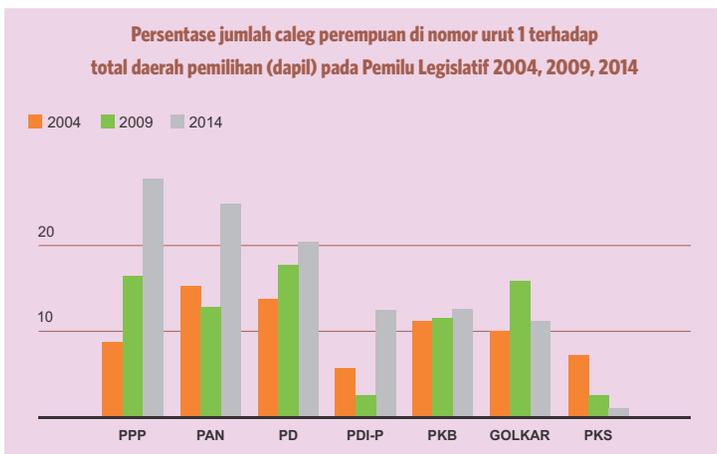
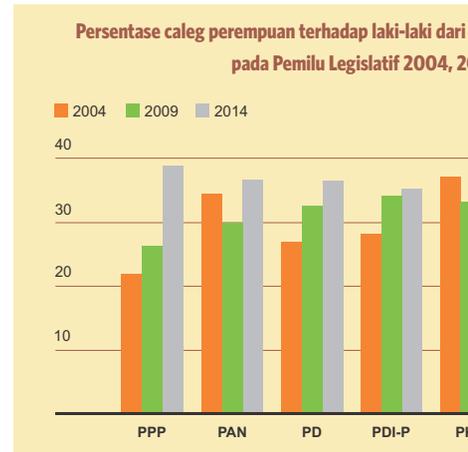
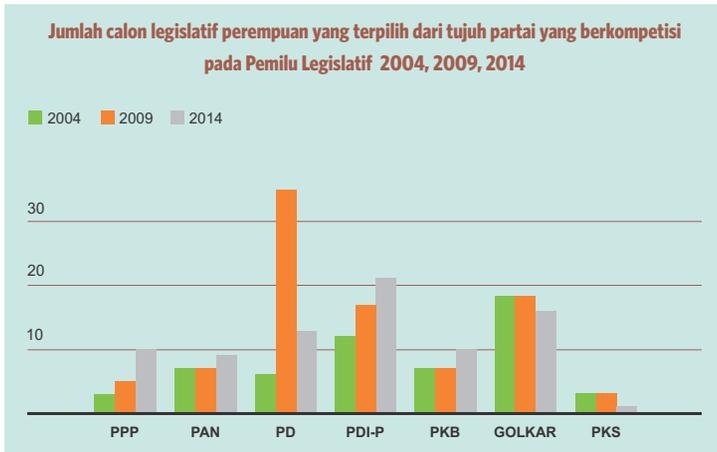
Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa nomor urut sangat menentukan keterpilihan seorang caleg. Meski demikian, patut pula dicermati bahwa peluang untuk terpilih nomor urut empat dan seterusnya ternyata meningkat 10 kali lipat dari 1,6 persen pada 2004 menjadi 16,4% pada pemilu 2014.

Sementara itu, keterpilihan caleg nomor satu terus menurun dari 73,6 persen pada 2004 menjadi 62,1 persen pada 2014. Sebagian faktor penjas dari tren ini adalah mulai diberlakukannya sistem pemilu yang terbuka (*open-list*) pada pemilu 2014. Dalam sistem ini, kalah-menangnya caleg semata ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Sistem pemilihan yang semacam ini memberikan peluang untuk caleg di nomor urut besar bisa terpilih, dan trennya terus naik.

Cara Partai Menominasikan Caleg Perempuan

Analisa terhadap tujuh partai politik yang mengikuti tiga pemilu legislatif menunjukkan bahwa tiap-tiap partai memiliki pola yang berbeda saat menominasikan caleg perempuan. Grafik di bawah ini menunjukkan dua partai berbasis Islam; Partai Persatuan Pembangunan





(PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempatkan caleg perempuan di nomor urut satu dengan tren yang berlawanan arah.

PPP secara stabil dan signifikan terus menambah porsi caleg perempuan nomor urut satu, bahkan rasionya merupakan yang tertinggi di antara semua partai. Sedangkan PKS menempatkan semakin sedikit perempuan di nomor urut 1.

Pada pemilu 2014, PPP menempatkan perempuan sebagai caleg nomor satu di 22 daerah pemilihan (dapil), sementara PKS hanya mengisi satu daerah pemilihan dengan perempuan sebagai caleg teratas.

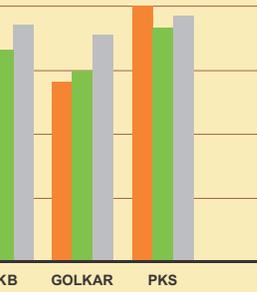
Partai-partai lain, kecuali Golkar, menunjukkan peningkatan alokasi caleg perempuan di nomor urut satu. Peningkatan paling tajam terjadi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kenaikannya mencapai nyaris 600 persen dibandingkan pemilu 2009.

Dalam pemilu 2014, terlihat jelas bahwa 90 persen caleg perempuan yang terpilih dari PPP adalah mereka yang menempati nomor urut satu. Dengan kata lain, banyak pemilih PPP mendukung caleg perempuan yang ditempatkan di posisi teratas. Sementara di partai lain, seperti Golkar dan Demokrat, mayoritas perempuan yang terpilih justru bukan duduk di nomor urut satu, sebagian bahkan ada yang melaju dengan nomor urut tujuh, delapan, dan sembilan.

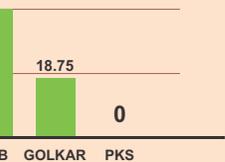
Grafik berikut memetakan tingkat kesuksesan caleg perempuan dengan nomor satu dalam pemilu 2009 dan 2014. Terlihat bahwa pada pemilu 2009, Partai Demokrat, PDI-P, dan PKS berhasil mengirimkan 100 persen caleg perempuan nomor urut satu ke DPR.

Sementara di pemilu berikutnya, "success rate" ini anjlok untuk semua partai kecuali Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Salah satu faktor

Tujuh partai yang berkompetisi
2009, 2014



Urut 1 yang terpilih dan
partai di Pemilu Legislatif 2014



Sumber : KPU dan tabulasi oleh penulis
Source : The Conversation

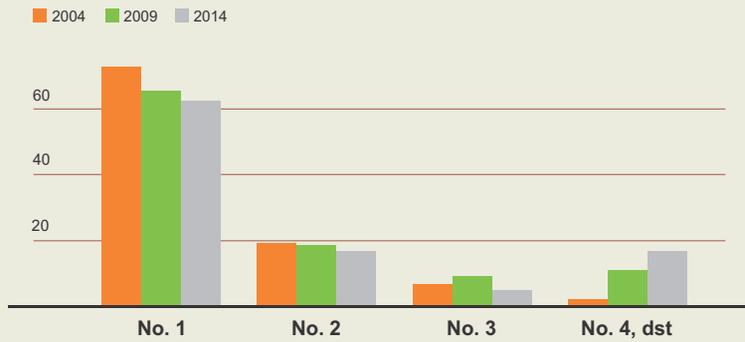
penjelasnya terletak pada aspek sistem pemilu terbuka, yang memungkinkan semua caleg bisa terpilih tanpa peduli posisi nomor urut. Aspek lain ditentukan oleh berkurangnya perempuan ditempatkan di posisi teratas, terjadi di PKS yang hanya punya satu dapil dengan caleg perempuan sebagai pemimpin daftar calon tetap (DCT).

Selanjutnya Apa?

Berkaca dari pengalaman tiga kali pemilu legislatif, apakah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah anggota perempuan DPR? Satu hal yang tetap relevan adalah mengupayakan agar caleg perempuan semakin banyak ditempatkan di nomor urut teratas, meskipun memang dengan sistem terbuka siapa saja dan di nomor mana saja bisa terpilih.

Di sisi lain, beberapa politikus dan aktivis perempuan mulai mendesak agar partai politik memainkan peranan yang lebih gencar dalam

Rasio antara jumlah caleg dan jumlah caleg terpilih berdasarkan nomor urut 1,2,3,4 dan seterusnya pada Pemilu Legislatif 2004, 2009 dan 2014



kaderisasi agar perempuan yang maju dalam pemilihan legislatif adalah mereka yang benar-benar memiliki sumber daya serta kemampuan politik yang serius.

Sebuah survei oleh *International Foundation for Electoral System (IFES)* pada 2010 mengindikasikan bahwa pemilih meminati caleg perempuan yang memiliki beberapa kualitas unggulan. Kualitas yang paling dicari oleh pemilih adalah kecerdasan (35 persen), bersih dari korupsi (26 persen), dan pengalaman di dunia politik (20 persen). Hal ini menunjukkan bahwa untuk berhasil mendulang suara, caleg perempuan perlu mengasah nilai tambahnya mulai dari kemampuan intelektual, praktik politik yang bersih, dan mengumpulkan “jam terbang” sebagai politikus.

Pada akhirnya, memperbanyak jumlah caleg perempuan memang penting untuk menjamin peluang keterpilihan di pemilu. Lebih ideal lagi bila partai serius menempatkan perempuan sebagai kandidat teratas di banyak dapil. Namun jauh lebih penting sekarang adalah meningkatkan kualitas caleg agar jumlah perempuan menjadi wakil rakyat di DPR menjadi lebih banyak. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel diambil dari Magdalene.co sebuah publikasi online yang menawarkan perspektif baru di luar batasan gender dan budaya yang khas. Penulis adalah mahasiswa program doktoral di Universitas Western Australia. Artikel juga dapat dibaca pada link www.magdalene.co/news-1583-bagaimana-dongkrak-keterwakilan-perempuan-di-C2%A0dpr.html



Langkah Awal

Mengurai Masalah Kesehatan di Bojonegoro

Oleh **DJADJAT SUDRADJAT**

A

angka Kematian Bayi (AKB) di Bojonegoro secara berturut-turut sejak tahun 2015-2016 menempati urutan tertinggi di Provinsi Jawa Timur, yaitu berjumlah 270 pada tahun 2015 dan tetap sama pada tahun 2016, yaitu 270. Sedangkan hingga November 2017, telah terjadi 140 kasus AKB. Tentu saja hal ini amat memprihatinkan dan memerlukan penanganan serius.

Bupati Bojonegoro yang akrab disapa Kang Yoto, sejak awal menekankan pentingnya menekan angka kematian Ibu dan Bayi dalam fokus utama kerja di bidang kesehatan. Karena itu Bupati mendorong program MELAYANI agar fokus pada isu Angka Kematian Bayi (AKB). Selain AKB merupakan indikator kinerja utama daerah, yang paling penting adalah menyangkut masa depan dan kualitas



Foto : Doc. Yayasan BaKTI

sumber daya manusia penduduk Bojonegoro. Hal serupa diamini oleh Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ibu Sally Atyasami yang juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan Ibu dan Bayi yang merupakan sumber daya serta asset daerah ke depan. Hal ini disampaikan pada Diskusi Identifikasi Masalah Prioritas Kesehatan untuk Kabupaten Bojonegoro, yang berlangsung di Kantor Bupati Bojonegoro 17 Desember lalu.

Diskusi yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kesehatan, Dr. Syaiful, diikuti 16 peserta yang berasal dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Bidan Koordinator Puskesmas. Diskusi ini membahas isu penting yang menjadi prioritas bidang kesehatan di Bojonegoro, yaitu menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB). Kesepakatan mengangkat isu AKB sebagai fokus program Melayani di Bojonegoro, telah melalui serangkaian kegiatan intensif yang dilakukan oleh *Coach* (Pendamping) bersama Bappeda dan Dinas Kesehatan, melalui beberapa pertemuan maupun diskusi. Selain itu, untuk memperkuat pemilihan isu, juga dilakukan wawancara dan diskusi antara lain dengan Bupati Bojonegoro, Dr. Suyoto, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, Ketua Komisi C DPRD, perwakilan

LSM kesehatan, hingga tim teknis di Dinkes. Sementara LSM IDFoS yang bekerja untuk isu pelayanan publik, termasuk bidang kesehatan, juga menyampaikan kegelisahan dimana Bojonegoro termasuk kabupaten dengan AKB tertinggi di Jawa Timur dalam beberapa tahun belakangan.

Salah satu langkah pertamanya adalah diskusi identifikasi masalah utama bidang kesehatan. Kepala Bidang Kesmas Dinkes Kabupaten Bojonegoro, Dr. Ahmad Hernowo, memaparkan situasi terakhir AKB serta rencana program-program yang akan dilakukan. Disampaikan, penyebab langsung AKB di Bojonegoro yang tertinggi adalah BBLR atau Bayi Berat Lahir Rendah, yaitu mencapai 50% pada tahun 2016 dan Sept 2017, diikuti asfiksia (kekurangan oksigen) dan kelainan bawaan. Untuk itu, salah satu permasalahan yang harus menjadi perhatian adalah mencari penyebab dari BBLR, asfiksia dan kelainan bawaan tersebut.

Sementara itu, dalam diskusi, *Coach* melakukan identifikasi harapan dan kekhawatiran dari peserta. Semua peserta berharap dapat berkiprah lebih baik dan berkomitmen dalam menekan AKB. Selanjutnya, *Coach* dan peserta melakukan diskusi tentang visi peserta terhadap isu yang dibahas, yaitu 3 dan 5 tahun ke depan. Disepakati bahwa tahun 2021, setidaknya AKB berkurang 50% dari sekarang dan pada tahun 2023, AKB harus dibawah 20 kasus.

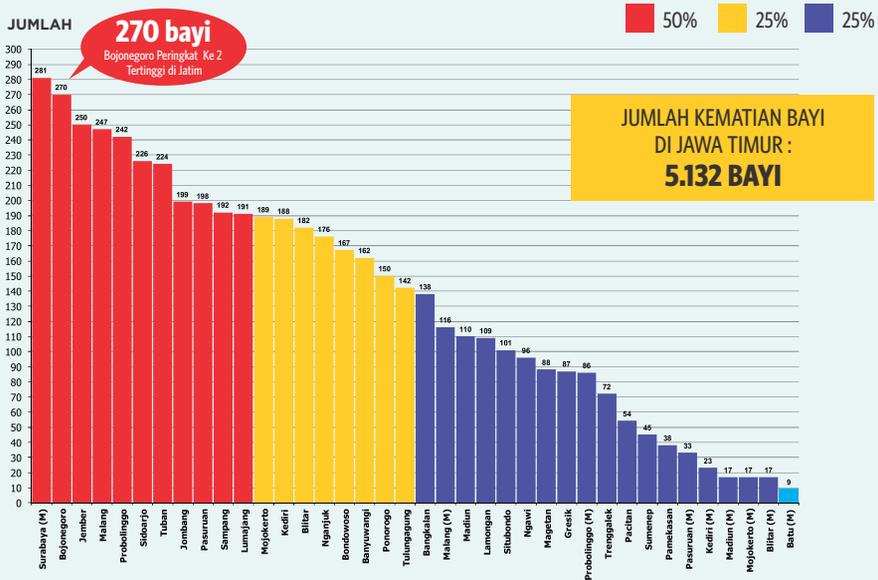
Dalam kesempatan yang sama, sebelum memulai tahapan-tahapan dalam Melayani, *Coach* menekankan bagaimana informasi dan data tentang AKB ini dapat dipahami dan terpapar oleh semua para pihak yang terlibat, yaitu Bappeda dan jajaran Dinas Kesehatan, termasuk Puskesmas dan bidan, sehingga dapat muncul kepedulian dan komitmen untuk menekan AKB bersama-sama.

Tindak lanjut dari diskusi ini adalah, akan dibentuk Tim kerja yang fokus dalam isu AKB serta akan dilakukan rangkaian pertemuan tiap 2 atau 3 minggu untuk bersama-sama merumuskan, menganalisa hingga mencapai solusi yang tepat berdasarkan masalah utama. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

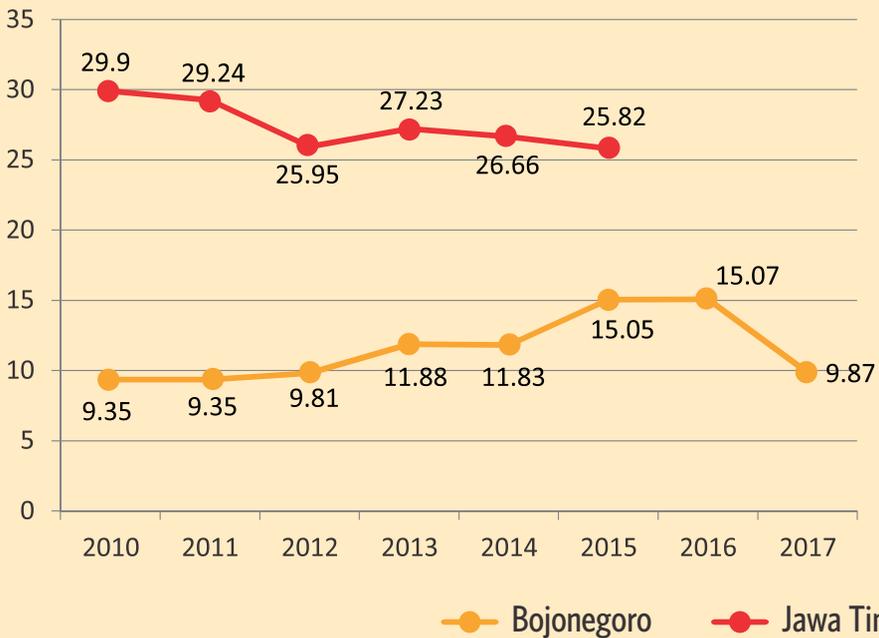
Penulis adalah coach Program Melayani di Bojonegoro. Informasi mengenai Program Melayani dapat menghubungi info@bakti.or.id

PERSENTASE JUMLAH KEMATIAN BAYI (USIA 0 - 11 BLN) DI JAWA TIMUR TAHUN 2015



Sumber : LB3-KIA KABUPATEN / KOTA

PERKEMBANGAN ANGKA KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN BOJONEGORO



Sumber : Provinsi (BPS), Kabupaten (Laporan Kematian)



Foto : N.J. Tarizkepayung / Yayasan BaKTI

Badan Musyawarah Kampung Papua

Oleh **HERACLES LANG**

Tidak dapat dipungkiri walaupun anggota dan ketua Bamuskam telah mengikuti beberapa pelatihan, namun masih sangat memerlukan bantuan teknis yang lebih komprehensif mengenai penyusunan RPJM kampung, sampai merincikannya ke dalam RKP, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi.

S

ebagai bagian dari proses otonomi khusus yang diperjuangkan oleh rakyat Papua dan disahkan oleh negara dan diatur dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2001

(UU 21/2001) tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua, Badan Musyawarah Kampung atau Bamuskam didefinisikan sebagai berikut: Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung. Sedangkan kampung didefinisikan sebagai: Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 (PP 43/2014) mengatur pembentukan desa/kampung dengan perangkat pemerintahan, termasuk pembentukan badan permusyawaratan desa (BPD) dan rincian tugas utama badan tersebut.

Pembentukan Badan

Ketua dan anggota Bamuskam ditentukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Keseluruhan proses ini dipimpin oleh kepala kampung dengan membentuk panita pengisian keanggotaan Bamuskam dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatan panitia. Keanggotaan panitia ini berasal dari unsur-unsur perangkat desa dan unsur-unsur masyarakat lainnya minimal 6 bulan sebelum masa jabatan Bamuskam yang ada, berakhir. Hasil kerja panitia dilaporkan kepada kepala desa maksimal 7 hari setelah proses musyawarah dan mufakat atau pemilihan tersebut selesai. Kepala desa kemudian mengirimkan hasil tersebut kepada Bupati paling lama 7 hari setelah diterimanya hasil kerja panitia pemilihan oleh Kepala Desa.



Penetapan hasil pemilihan tersebut oleh Bupati maksimal 30 hari setelah hasil pemilihan tersebut diatas. Pengucapan sumpah dan janji Bamuskam dipandu oleh Bupati paling lambat 30 hari setelah surat penetapan dilakukan.

Dari telaah Peraturan Pemerintah (PP) 43/2014 dapat dirangkum tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bamuskam sebagai berikut:

1. Menyusun Tata Tertib musyawarah
2. Melaksanakan musyawarah untuk konteks Papua dan Papua paling tidak untuk keperluan:
 - a. Rencana pemekaran/penggabungan desa (jika ada).
 - b. Rencana perubahan status desa misalnya dari kampung adat menjadi kampung.
 - c. Pemilihan dan pengesahan Kepala Kampung.
 - d. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala kampung kepada Bupati.



Foto : Doc. Pajmrov Papua

- e. Penyusunan peraturan kampung.
- f. Perencanaan dan Program Pemerintah Kampung.
- g. Perencanaan Pembangunan Kampung.
3. Melaksanakan fungsi musyawarah
4. Membantu pemerintah kampung dalam pemberdayaan masyarakat.

Dari pengalaman pelaksanaan Bamuskam di 6 kampung di Kabupaten Supiori dan Jayapura, beberapa pembelajaran penting yang ditemui mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap pemantauan.

Tahap perencanaan (Musrenbang) di 6 kampung yang dikunjungi dimulai dengan penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) kampung. Pada tahap perencanaan tahunan Bamuskam berperan sebagai wadah konsultatif perencanaan dan memimpin proses pembahasan dokumen

perencanaan. Di kampung-kampung Odori, Warbor dan Asei Besar proses perencanaan yang digalang oleh Bamuskam adalah sebagai berikut: Rapat mengenai program yang akan dilaksanakan pada awal tahun anggaran dilaksanakan untuk perencanaan tahun anggran berikutnya. Rapat tertutup ini dihadiri oleh ketua, seluruh anggota Bamuskam dan Kepala Kampung beserta anggotanya. Materi rapat berupa usulan program yang didapat berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat. Hasil diskusi atas usulan program pada rapat tertutup diatas kemudian didiskusikan dalam forum musyawarah terbuka dengan seluruh anggota masyarakat untuk mendapat masukan dan atau persetujuan. Forum ini dipimpin oleh Bamuskam. Hasil dari musyawarah dengan masyarakat tersebut adalah Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kampung. Kepala kampung kemudian

melaporkan RKP tersebut kepada Kepala Distrik/Camat agar dapat dimusyawarahkan dan digabungkan dengan RKP dari kampung lain. Bamuskam mengawal usulan RKP kampung tersebut sampai ke musyawarah distrik. Keseluruhan proses perencanaan didasarkan pada RPJM kampung yang telah disusun sebelumnya.

Tidak dapat dipungkiri walaupun anggota dan ketua Bamuskam sudah mengikuti beberapa pelatihan, namun masih sangat memerlukan bantuan teknis yang lebih komprehensif mengenai penyusunan RPJM kampung, sampai merincikannya ke dalam RKP, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi. Kebutuhan terkait lainnya juga adalah kemampuan analitis, wawasan gender, lingkungan dan kemampuan administrasi dan keuangan.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, walaupun para anggota Bamuskam dapat menunjukkan dengan cepat hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Prospek (Program Strategis Pembangunan Kampung, sebelumnya disebut Respek). Alokasi dana Prospek pada masa kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe bersumber dari alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Beberapa anggota Bamuskam benar-benar tidak mengetahui besaran dan rincian penggunaan dana yang dicairkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Prospek akhirnya sulit untuk melaksanakan pemantauan independen. Walaupun masyarakat telah belajar dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebelumnya bahwa tahap perencanaan harus dilakukan dengan baik agar hasil guna kegiatan dapat lebih terjamin.

Persiapan pelaksanaan berupa penyiapan rencana detil yang matang juga diperlukan agar pembangunan sebuah fasilitas dapat sesuai dengan konteks lingkungan mikro dimana sarana/prasarana (sarpras) tersebut akan dibangun. Selain itu, mengalokasikan dana tidak terduga yang lebih besar untuk wilayah perencanaan yang faktor ketidaktahuannya lebih besar saat merencanakan alokasi anggaran. Cara lain yang dapat ditempuh juga adalah dengan memberikan fleksibilitas penggunaan dana untuk aktifitas agar dapat saling menutupi antar kegiatan.

Pada proses pemantauan dan pengawasan pada ketiga kampung memang belum dilakukan dengan proses monitoring evaluasi yang formal. Diharapkan ke depan, ada alat pemantauan yang dirancang khusus agar Bamuskam dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan program, mampu memberikan gambaran sejauh mana aspirasi masyarakat sudah atau belum dipenuhi atau belum. Sehingga hasilnya dapat menjadi masukan untuk aktifitas atau program tahun berikutnya.

Melihat proses persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan masih membutuhkan beberapa proses penguatan masyarakat agar mencapai hasil yang maksimal. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan; penyusunan modul, kurikulum dan silabus pelatihan; serta rencana pelatihan Bamuskam maupun unsur kampung lainnya yang terkait pengelolaan dana kampung. Merancang proses penguatan seluruh perangkat pelaksana dana kampung termasuk anggota Bamuskam agar dapat memberikan manfaat bagi kampung terkait. Diperlukan tim pendamping kampung terdiri dari paling tidak seorang ahli di bidang teknik, satu orang memiliki keahlian di bidang pemberdayaan masyarakat, dan satu orang di bidang pemberdayaan ekonomi lokal.

Mengingat porsi pelaksanaan kegiatan ekonomi pada Program Prospek yang 70%, maka rancangan kegiatan peningkatan ekonomi perlu difasilitasi dengan baik oleh pendamping yang memiliki kapasitas yang memadai pada bidangnya. Identifikasi kegiatan ekonomi lokal perlu disesuaikan dengan kemampuan atau karakteristik masyarakat kampung yang bersangkutan dan diharapkan pendamping kampung juga diharapkan mampu memperkenalkan kegiatan baru yang lebih berkelanjutan atau *sustainable*. ●

BAMUSKAM DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KAMPUNG ASEI BESAR

Badan Musyawarah Kampung Asei Besar cukup aktif dalam pelaksanaan pembangunan di kampungnya yang kini mendapatkan dana hampir sebesar 1,4 milyar rupiah. Masyarakat telah belajar dari pelaksanaan Respek bahwa tahap perencanaan harus dilakukan dengan baik agar hasil guna kegiatan dapat lebih terjamin.

Dari diskusi dengan Bamuskam diketahui bahwa masyarakat juga telah menyadari bahwa persiapan pelaksanaan berupa penyiapan rencana detil yang matang juga diperlukan agar pembangunan sebuah fasilitas dapat sesuai dengan konteks lingkungan mikro dimana sarana/prasarana (sarpras) tersebut akan dibangun. Pada pembuatan Karamba walaupun desain dan struktur bangunan karamba yang didanai Prospek telah lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya yaitu dengan melengkapi dengan atap pelindung karamba dari teriknya sinar matahari serta tempat penyimpan pakan ikan namun substruktur bangunan karamba harus diperhitungkan secara berbeda untuk bagian danau yang dalam maupun yang tidak terlalu dalam.

Masyarakat Asei Besar kemudian menempuh cara untuk memodifikasi desain substruktur karamba dengan kayu yang lebih kecil penampangnya dan memberi sedikit tambahan dana dari penerima manfaat sendiri untuk pembangunan karamba masyarakat yang tinggal di tepian danau Sentani Timur yang

cukup dalam. Hal ini menggambarkan beberapa nilai penting pada masyarakat setempat yaitu: rasa kepemilikan masyarakat yang tinggi pada program Prospek; keterbatasan dana tidak menghambat pelaksanaan proyek, sebaliknya memicu kreativitas warga setempat; hal ini terjadi juga karena fasilitasi yang baik dari pendamping masyarakat yang bekerja di kampung tersebut; dan kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa masyarakat memang membutuhkan Prospek yang rancangan kegiatannya sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi masyarakat setempat.

Selanjutnya pengembangan ekonomi di kampung Asei perlu diikuti dengan pemasaran hasil usaha setempat baik itu hasil panen ikan dari karamba: pengembangan budidaya ikan lainnya selain ikan mujair; penyimpanan dingin (*cold storage*); dan pengolahan ikan kering atau masakan ikan yang dapat tahan lama dan mudah disambut pasar. Dapat juga dikembangkan wisata kuliner untuk wisatawan lokal dengan memasak dan mengkonsumsinya di tempat. Usaha pemancingan untuk karamba yang bisa diakses oleh wisatawan atau masyarakat luar. Hal-hal tersebut adalah sebagian kecil dari banyak potensi ekonomi yang dapat terus dikembangkan dan difasilitasi oleh Prospek dan dapat diterapkan di wilayah seperti Kampung Asei. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Adviser KOMPAK dan dapat dihubungi via email : heracles.jang@kompak.or.id

Melihat Kembali Subsidi Transportasi Pariwisata

Banda Neira

Oleh **KAMARUDDIN AZIS**



Shahabat saya, Mad Korebima, aktivis kelautan yang berbasis di Ambon, mengomentari postingan terkait subsidi dan layanan moda transportasi

perintis dari Ambon ke Banda Neira.

Di artikel itu sesuai dengan konfirmasi ke operator pariwisata, saya nilai bahwa terbatasnya frekuensi penerbangan merupakan salah satu yang perlu dibereskan jika ingin melihat pariwisata Banda Neira melesat jauh.

Saya tertarik pada pikiran Mad. “Yang perlu disubsidi itu, kapal cepat ketimbang pesawat yang hanya dinikmati segelintir orang.” Begitu hasratnya.

Subsidi dan Penerbangan Perintis

Sebelum menilai perlu tidaknya subsidi atau bagaimana semestinya, ada baiknya kita periksa

status penerbangan perintis sebagai gagasan sekaligus praktik pembangunan yang sudah ada sejak masa Orde Baru.

Penerbangan perintis. Sampai saat ini penerbangan perintis tetap dipertahankan di Indonesia sebagai jawaban atas disparitas wilayah dan untuk menunjukkan bahwa Pemerintah ada di wilayah jauh.

Indonesia yang memiliki banyak pulau dan daerah berbukit menjadi alasan mengapa penerbangan perintis masih dibutuhkan. Penerbangan perintis sejatinya adalah layanan transportasi publik dalam negeri yang melayani dan menghubungkan daerah terpencil. Pada daerah tertinggal, tak terjangkau moda transportasi lain serta secara komersial belum menguntungkan. Diulang, belum menguntungkan.

Indonesia nan luas dijejali tak kurang 16 ribu pulau. Ada seratusan lebih berada di perbatasan dan rentan. Karenanya gagasan penerbangan dan perhubungan laut menjadi penting.



Atas : **Pemandangan Alam Banda Neira nan elok.**
Bawah : **Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan Banda Neira**
Foto : www.bandaneira.id

Merpati Air, salah satu penerbangan perintis yang berada di garda depan dan menjawab realitas itu. Sayangnya, mereka kolaps dan menguap seiring linimasa. Sebelumnya, untuk Banda Neira sebagai contoh, maskapai ini melayani rute Ambon - Banda Neira sejak tahun 2013. Mereka membuka layanan penerbangan

perintis ke sana dengan menggunakan pesawat tipe A/C Casa 212. Kala itu, penerbangan jurusan Kota Ambon menuju Banda Neira pulang pergi dilayani sebanyak 3 kali penerbangan pulang pergi selama satu minggu.

Pada tahun berikut, maskapai Aviastar melayani rute yang sama: jalur Amahai, Wahai, Banda Neira namun menggunakan DHC 6. Belakangan Aviastar dari PT Aviastar Mandiri melayani rute Jakarta, Lampung, Balikpapan, Palangkaraya, Samarinda, Makassar, Nabire, Tana Toraja, Datarah Dawai dan Banjarmasin.

Maskapai ketiga adalah Trigana Air, melayani Jayapura - Wamena, Jayapura - Nabire, dan Jakarta - Pangkalan Bun. Lalu menyusul Susi Air, Nam Air - anak perusahaan Sriwijaya Air yang akrab dengan rute Maumere, Kupang



Butuh daya besar untuk memajukan pariwisata Banda Neira.

Foto : Kamaruddin Azis

dan Waingapau dengan pesawat jenis Boeing 737-500.

Wings Air tak ketinggalan. Mereka juga belakangan ini wara-wiri melayani rute Silangit, Solo, Luwu, Berau dan Selayar. Tak hanya anak perusahaan Lion Air itu, Garuda Indonesia Airlines pun ikut bermain di ceruk bisnis ini dengan melayani rute Bima, Lombok, Labuan Bajo, Luwuk, Mamuju, Ende dan Jember.

Kapal Laut Perintis

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga menyiapkan dana tak sedikit untuk mengakses pulau-pulau atau daerah jauh. Penyelenggaraan angkutan laut perintis diperlukan untuk mendorong pengembangan daerah, meningkatkan konektivitas antar pulau dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya demi terwujudnya stabilitas nasional.

Pada tahun 2016 disediakan anggaran sebesar 930,99 miliar rupiah untuk ini. Subsidi diberikan untuk pelayaran di 96 trayek kapal perintis dan skema perintis akan dikelola oleh PT Pelni.

Setahun kemudian, anggaran naik ke angka 943,99 miliar rupiah. Anggaran yang dikelola PT

Pelni sebesar 512,92 miliar rupiah dan pihak swasta sebesar 431,07 miliar rupiah. Pada Memasuki tahun 2018, trayek angkutan laut perintis meningkat menjadi 113 trayek dari sebelumnya hanya 90-an.

Khusus untuk Maluku, ada lima rute yang dilayani, salah satu di antaranya adalah rute Ambon – Geser- Pulau Manawoka/Amarasikaru - Gorom / Ondor - Kesui - Tior - Kaimer - Pulau Kur - Pulau Toyando - Tual - Dobo - Tual - Banda - Amahai - Ambon.

Subsidi Penerbangan

Masyarakat di pulau-pulau terpencil kawasan timur Indonesia masih terkendala keterbatasan infrastruktur dan sarana transportasi makanya solusinya adalah moda transportasi perintis. Lokasi seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, hingga Nusa Tenggara Timur yang sangat membutuhkan dukung ini. Menurut data Kemenhub, Dari 320 bandar udara, hanya 44 bandara yang melayani penerbangan perintis bersubsidi.

Berkaitan dengan penerbangan, Pemerintah sejauh ini menyiapkan skema subsidi dengan menanggung biaya transportasi udara.

Ditujukan untuk wilayah-wilayah jauh dan potensial.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan maka ada Permen Perhubungan Nomor PM 9 tahun 2016 yang berkaitan dengan kriteria dan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis. Tujuannya adalah untuk dapat menghubungkan daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah. Ini termasuk untuk stabilitas, pertahanan dan keamanan negara.

Bagi Pemerintah, penyelenggaraan angkutan perintis merupakan wujud kehadiran negara terhadap masyarakat sesuai dengan Nawa Cita pertama. Disebutkan pula bahwa angkutan udara perintis terdiri dari angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo. Ada beberapa kriteria, di antaranya merupakan daerah terpencil, tertinggal dan belum terlayani oleh moda transportasi lain serta secara komersial belum menguntungkan.

Menimbang Efektivitas

“Pesawat ke Banda Neira masih sangat terbatas,” kata Reza Tuasikal, operator wisata yang sangat berharap intensitas penerbangan menjadi berlipat sebab menurutnya potensi wisata Banda Neira sangat besar untuk dikembangkan.

Sebagai seorang operator wisata, intensitas penerbangan yang rutin dapat memudahkannya mengatur rute perjalanan dan keberlangsungan usaha penginapannya. Sayangnya, daya muat pesawat terbang yang mendarat di Banda Neira masih terbatas, yakni sekitar 12 orang penumpang saja. Jadwal penerbangan ke Banda Neira juga tidak tiap hari. Tiket pesawat harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya.

Meski harga tiket pesawat terbang relatif murah namun kondisi yang disebutkan sebelumnya adalah alasan mengapa banyak warga cenderung memilih kapal cepat ketimbang penerbangan perintis.

Berkaitan dengan agenda pembangunan Pemerintah yang ingin membangun wilayah-wilayah potensial melalui pariwisata, maka lokasi seperti Banda Neira rasanya harus menjadi prioritas utama terkait misi subsidi

untuk penerbangan ini. Rute dan jadwal penerbangan yang efektif serta terjamin diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan geliat pariwisata.

Sayangnya, seperti tanggapan Mad, seharusnya subsidi penerbangan ke Banda dicabut saja dan diberikan subsidi ke kapal cepat. “Separuh lebih isi pesawat adalah turis dan daya angkut pesawat yang cuma belasan orang saja. Enak benar turis datang berwisata tapi biaya transportasinya disubsidi pemerintah,” katanya. Menurut Mad, sebagai penerbangan subsidi seharusnya memang dimanfaatkan oleh penumpang lokal. Mad optimis bahwa dengan menjadikan penerbangan sebagai penerbangan komersial yang terbuka, maka besar kemungkinan penerbangan akan bertambah sesuai kebutuhan pasar penumpang yang ke Banda.

Menurut Mad bisa dengan memberikan subsidi ke kapal cepat akan bermanfaat bagi lebih banyak orang yang membutuhkan. “Berikan subsidi ke Kapal cepat sehingga secara keadilan sosial bisa dinikmati masyarakat Banda yang butuh transportasi cepat. Selain itu, juga bisa mengatisipasi jumlah turis yang berkunjung. Jumlah pelayaran juga bisa lebih banyak,” katanya. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis dapat dihubungi via email daeng.nuntung@gmail.com

Aplikasi Beras Fortifikasi Berbasis Kawasan Pinggir Hutan di Lombok Timur

Oleh **HERMAN RAKHA**



Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat kasus gizi buruk tergolong tinggi. Pada tahun 2016 tercatat untuk kasus gizi buruk mencapai

328 kasus. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2017 Kabupaten Lombok Timur terdapat 80 kasus. Kepala Dinas Kesehatan NTB, Nurhandini Eka Dewi menyatakan bahwa pada umumnya kasus gizi buruk yang terjadi di NTB disebabkan oleh karena pola asuh yang tidak memadai.

Terdapat dua penyebab masalah gizi pada faktor penyebab langsung, yaitu asupan gizi yang kurang dan penyakit infeksi. Sedangkan pada penyebab tidak langsung, disebabkan oleh tiga faktor besar, yaitu tidak cukup pangan, pola asuh yang tidak memadai, dan sanitasi, air bersih/pelayanan kesehatan dasar yang tidak memadai. Sementara Penyebab mendasar atau akar masalah gizi adalah terjadinya krisis ekonomi, politik dan sosial termasuk bencana alam, yang mempengaruhi ketersediaan pangan, pola asuh dalam keluarga dan pelayanan kesehatan serta sanitasi yang memadai, yang pada akhirnya mempengaruhi status gizi balita.

Untuk mengatasi gizi buruk, pemerintah telah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk menekan terjadinya kasus gizi buruk terjadi lagi. Diversifikasi pangan merupakan salah satu alternatif yang

dijalankan oleh pemerintah namun, program diversifikasi pangan ini juga belum mampu mengatasi kasus gizi buruk. Selain itu pula untuk membantu ketersediaan pangan bagi rakyat, pemerintah juga telah menggelontorkan program Beras Sejahtera atau Rastra. Namun, sekali lagi cara ini juga belum mampu mengatasi terulangnya kasus gizi buruk melainkan terkadang program ini menimbulkan berbagai permasalahan terutama penyelewengan didalam proses penyaluran dan peruntukannya. Berlandaskan berbagai persoalan di atas maka, pada Kamis, 30 Oktober 2017 bertempat di Pondok Pesantren Thohir Yasin Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Lombok Timur diadakan sosialisasi mengenai Beras Fortifikasi dalam upaya sebagai pengganti berkurangnya micro nutrient dalam kandungan beras.

Kegiatan sosialisasi yang difasilitasi oleh *Lombok Research Center (LRC)* menghadirkan Giri Arnawa sebagai pembicara. Giri Arnawa merupakan Advisor for ASEAN *Sustainable Agrifood System* pada lembaga GIZ.

Beberapa pengolahan beras yang dilakukan selama ini telah mengakibatkan defisiensi nutrisi pada beras (Arnawa, G, 2016). Sehingga, diperlukan perlakuan tertentu untuk mengatasi masalah tersebut dan salah satu metode yang dapat dilakukan adalah melalui fortifikasi pada unsur zat besi, zinc, asam folat, vitamin A dan vitamin B12.

Lombok Research Center (LRC) dan Giri Arnawa memilih pondok pesantren sebagai upaya awal memperkenalkan metode fortifikasi beras dilandasi dengan berbagai alasan. Salah



Foto : Doc. Lombok Research Center

satu alasan utama adalah rutinitas belajar yang tinggi, membutuhkan asupan gizi yang lebih lengkap pula guna menunjang daya ingat dan daya cerna santri dalam menerima pelajaran. Animo para peserta sosialisasi terdiri dari santri dan pengelola pondok pesantren sangat tinggi sehingga, mereka berharap dapat menjadi contoh di dalam aplikasi penerapan beras fortifikasi.

Bagi LRC sebagai sebuah lembaga yang peduli terhadap kondisi sosial masyarakat memandang penting kegiatan sosialisasi mengenai beras fortifikasi ini. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas pangan, dan memperkenalkan praktik-praktik pertanian yang baik. Selain itu, keterkaitan asupan gizi terhadap peningkatan prestasi anak dalam pendidikan. Prestasi belajar pada umumnya dilandasi oleh faktor intelegensi dan dan motivasi untuk berprestasi. Intelegensi berasal dari faktor genetik dan pengalaman, sedangkan motivasi berasal dari pengalaman. Anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dapat dengan mudah menerima pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu.

Kecerdasan ini diatur oleh bagian korteks otak yang dapat memberikan kemampuan untuk berhitung, beranalogi, berimajinasi, dan memiliki daya kreasi serta inovasi. Secara garis besar, faktor-faktor kecerdasan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: (1) faktor genetik; (2) faktor gizi; dan (3) faktor lingkungan. Kecerdasan seorang anak sangat bergantung pada perkembangan otaknya. Perkembangan otak sangat tergantung dari asupan bahan makanan dan gizi yang dikandungnya. Untuk itu, pemenuhan gizi tinggi sangat diperlukan bagi anak (Boeree, 2003).

Melalui kegiatan sosialisasi tentang aplikasi beras fortifikasi ini diharapkan bahwa pemenuhan asupan pangan yang bergizi sangat penting untuk diperhatikan selain dari faktor lingkungan dan ekonomi. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah staff Lombok Research Center. Informasi lebih lanjut tentang Lombok Research Center, silakan menghubungi boogiederaya@gmail.com



Pelindung Penyu
dari Kepunahan itu Bernama
Taman Pesisir
Jeen Womom

Oleh **M. AMBARI**



Seorang staf WWF Indonesia memasang *satellite tag* ke seekor penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*) untuk pemantauan spesies itu di kawasan Taman Pesisir Jeen Womom, Tambrauw, Papua Barat. Foto : WWF-Indonesia / Mongabay Indonesia.

Abun tersebut, pada 2015 kemudian dilebur menjadi satu kawasan dan diberi nama pantai Jeen Womom oleh masyarakat adat setempat. Perubahan nama tersebut, menurut Benja, dilakukan saat upacara adat pemanggilan Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*) oleh masyarakat adat di tahun tersebut. Perihal pemberian nama Jeen Womom, masyarakat adat memilihnya karena itu berasal dari bahasa setempat dan bermakna sebagai pantai penyu. Jarak kedua pantai yang sudah dilebur tersebut mencapai 30 kilometer.

Perubahan nama tersebut diresmikan melalui SK Bupati No.522/303 Tahun 2015. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa kedua pantai yang sudah dilebur tersebut total luasnya mencapai 32.250,86 hektare.

Selain penyu Belimbing, Benja menyebutkan, di Jeen Womom juga terdapat tiga jenis penyu yang statusnya kini dilindungi oleh Pemerintah Indonesia. Ketiga penyu tersebut, adalah Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Hijau (*Chelonia mydas*), dan Sisik (*Eretmochelys imbricata*). Keempat jenis penyu yang menjadikan Jeen Womom sebagai habitat, terbiasa melakukan peneluran rutin sepanjang tahun.

Atas dasar pertimbangan sebagai habitat penyu, Pemerintah Indonesia kemudian memutuskan Jeen Womom sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) dan kemudian dikelola menjadi Taman Pesisir (TP) Jeen Womom. Keputusan tersebut diatur resmi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.53/KEPMEN-KP/2017 tertanggal 22 Desember 2017 tentang Kawasan konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jeen Womom Kabupaten Tambrauw dan Perairan sekitarnya. Untuk luas kawasan keseluruhan, Benja mengatakan bahwa itu mengikuti keputusan Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang lebih dulu diterbitkan saat peleburan pantai

P

rovinsi Papua Barat menjadi provinsi paling penting untuk keberlangsungan habitat penyu. Tak hanya di Indonesia, Papua Barat juga berperan sangat

penting bagi habitat penyu dunia karena Kabupaten Tambrauw menjadi habitat utama bagi empat dari total enam jenis penyu yang ada di Indonesia.

Direktur WWF-Indonesia Program Papua, Benja V Mambai menjelaskan, habitat penyu di Tambrauw berlokasi di dua kawasan pantai, yaitu Pantai Jamursba Medi (Jeen Yessa) dan Pantai Warmon (Jeen Syuab). Kedua pantai penting yang masuk dalam wilayah Distrik

Seekor penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*) kembali ke laut setelah bertelur di kawasan Taman Pesisir Jeen Womom, Tambrau, Papua Barat. Jeen Womom ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) berbentuk Taman Pesisir untuk wilayah konservasi utama bagi 6 jenis penyu yang ada di Indonesia. Foto : WWF-Indonesia /Mongabay Indonesia



“

Tercatat pada tahun 2016, ditemukan satu individu penyu belimbing dan tiga individu penyu lekang yang mati dimangsa buaya muara. Pemangsa penyu oleh buaya terjadi pada malam hari pada saat penyu mendarat di pantai untuk bertelur.

Efraim Kambu

Community Organizer Site Abun
WWF Indonesia Program Papua

Jamursba Medi dan Warmon dan menamainya dengan Jeen Womom.

Penetapan sebagai Taman Pesisir (TP) tersebut memberi kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Tambrauw yang mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi. Apalagi, Tambrauw sebelumnya telah menjadi kabupaten pertama di Papua Barat yang menyerahkan Prasarana, Personil, Pendanaan dan Dokumen (P3D) dibidang Kelautan kepada Pemprov Papua Barat sebagai amanat UU No.23 Tahun 2014.

“Dengan luas kawasan mencapai 32 ribu hektar lebih, kawasan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw. Selain sebagai tempat peneluran terbaik, kita bisa melihat penyu dengan daya jelajah yang luas,” ujar Benja.

Sepanjang Tahun

Dikutip dari laman WWF-Indonesia, *Technical Leatherback Conservation Management Coordinator* WWF-Indonesia Program Papua Hadi Ferdinandus, menjelaskan, aktivitas peneluran penyu belimbing terjadi sepanjang tahun di Pantai Syuab yang sekarang ada dalam satu kawasan TP Jeen Womom. Dari 12 bulan, aktivitas

puncak berlangsung sekitar dua bulan pada Desember hingga Januari.

Hadi menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, populasi penyu belimbing di TP Jeen Womom terus mengalami penurunan setiap tahun sepanjang 27 tahun terakhir yang dihitung hingga 2016. Selama periode tahunan tersebut, populasi terus menurun hingga 78,3 persen.

“Untuk itu, WWF-Indonesia merasa perlu untuk melakukan pemantauan penyu dan pengendalian predator sebagai salah satu upaya untuk melindungi penyu,” tutur dia.

Menurut Hadi, di Jeen Syuab terdapat sejumlah jenis hewan yang secara alami memangsa penyu dan telurnya, seperti babi hutan, anjing (peliharaan dan liar), biawak, elang, kepiting, dan buaya muara.

Untuk biawak dan anjing, memiliki indera penciuman yang sangat baik, mampu mendeteksi keberadaan telur penyu lekang dengan kedalaman sarang antara 30 hingga 40 sentimeter. Bahkan mampu mendeteksi keberadaan telur penyu belimbing dengan kedalaman sarang antara sekitar 80 hingga 100 sentimeter.

Dari pemantauan penyu yang dilakukan Tim monitoring WWF-Indonesia pada periode



Januari-September 2016, Hadi mengatakan, ditemukan 26 sarang yang rusak dimangsa oleh biawak, terdiri dari 15 sarang penyu lekang dan 11 sarang penyu belimbing. Sedangkan sarang yang rusak dimakan anjing jumlahnya sebanyak 23 sarang dan terdiri dari 7 sarang penyu lekang dan 16 sarang penyu belimbing.

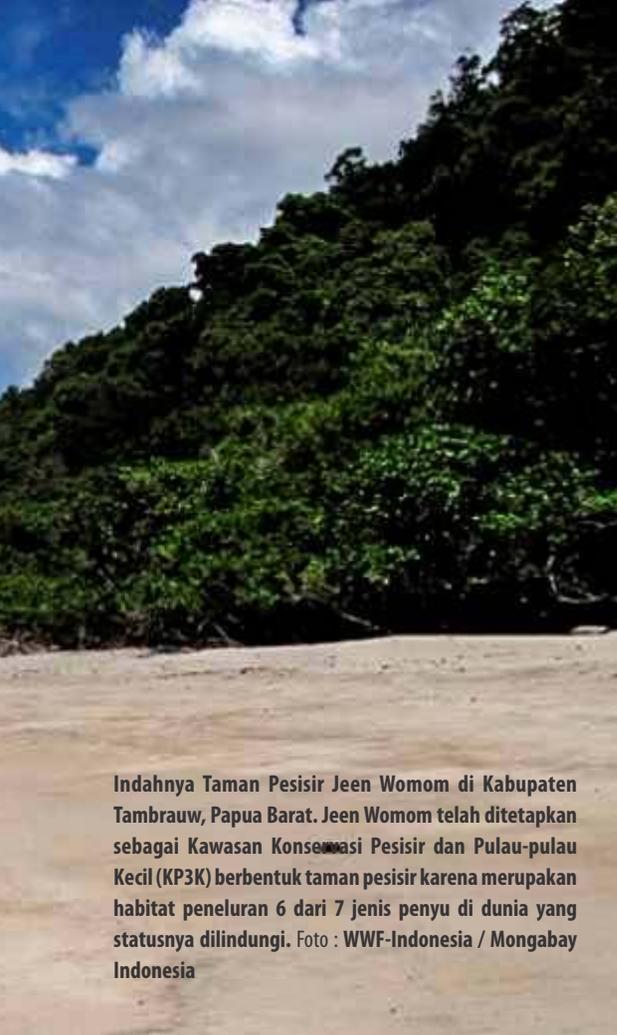
Dikutip dari laman WWF-Indonesia, *Community Organizer Site* Abun WWF Indonesia Program Papua Efraim Kambu menambahkan, hewan pemangsa seperti biawak biasanya melakukan aksinya pada pagi hari sekitar pukul 07.00 hingga 10.00 Waktu Indonesia Timur (WIT) dan sore hari mulai pukul 16.00 hingga 18.00 WIT. Sementara, hewan seperti anjing waktunya berbeda, karena melakukan pemangsaan hingga sepanjang waktu.

“Tidak saja memangsa telur tapi juga tukik yang menetas,” sebutnya.

Untuk burung elang, Efraim menjelaskan, waktu memangsa biasanya dilakukan pada siang hari. Kemudian, untuk kepiting biasanya memangsa penyu pada saat malam hari. Sementara, buaya muara (*Crocodolus porosus*) yang banyak terdapat di muara Sungai Pantai Jeen Syuab memangsa penyu karena makanan utama mereka seperti rusa dan kanguru pohon dari waktu ke waktu terus menurun populasinya.

“Tercatat pada tahun 2016, ditemukan satu individu penyu belimbing dan tiga individu penyu lekang yang mati dimangsa buaya muara. Pemangsaan penyu oleh buaya dilakukan pada malam hari, tepatnya pada saat penyu mendarat di pantai untuk bertelur,” papar dia.

Agar para pemangsa penyu bisa dikendalikan, Efraim mengatakan, WWF-Indonesia dan masyarakat lokal di Pantai Jeen Syuab bahu membahu untuk melakukan



Indahnya Taman Pesisir Jeen Womom di Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Jeen Womom telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) berbentuk taman pesisir karena merupakan habitat peneluran 6 dari 7 jenis penyu di dunia yang statusnya dilindungi. Foto : WWF-Indonesia / Mongabay Indonesia

pemasangan jerat dan pancing biawak. Selain itu, juga dilakukan relokasi sarang penyu yang terancam oleh predator, dan pengawasan terhadap pelepasan penyu ke laut.

Tujuh Spesies

Selain di Indonesia, penyu juga bisa ditemukan di sejumlah negara. Total, saat ini tersisa tujuh spesies penyu yang ada di dunia. Dari jumlah tersebut, enam spesies diketahui habitatnya ada di Indonesia. Jumlah keseluruhan tersebut, disebut menyusut karena sebelumnya penyu jumlahnya mencapai 30 spesies. Hal itu dikatakan *Marine Species Conservation Coordinator* WWF Indonesia Dwi Suprpti, saat di Jakarta 2015.

Dwi mengungkapkan, 6 (enam) spesies penyu yang ada di Indonesia adalah penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu lekang (*Lepidochelys*

olivacea), penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), penyu tempayan (*Caretta caretta*), dan penyu pipih (*Natator depressus*).

Dari 6 spesies tersebut, Dwi menyebutkan, saat ini 3 spesies statusnya sangat memprihatinkan. Terutama, spesies penyu sisik dan penyu hijau. Kedua penyu tersebut saat ini sudah bersatus hampir punah. Sementara, penyu belimbing kondisinya tak jauh berbeda, namun sudah lebih baik dari kedua saudaranya tersebut.

Penyebab utama terus menyusutnya populasi penyu di dunia, dan khususnya di Indonesia, adalah karena terjadinya alih fungsi lahan di pesisir pantai dan juga perubahan gaya hidup di masyarakat yang mendorong berlangsungnya perburuan terhadap penyu-penyu yang statusnya adalah satwa langka.

“Ini memang memprihatinkan. Kita harus bisa menyelamatkan penyu dari ancaman kepunahan. Mereka juga makhluk hidup yang harus diberi kesempatan untuk hidup,” tandas dia.

Secara spesifik, Dwi mengatakan, WWF Indonesia sudah berupaya melakukan penyelamatan terhadap penyu. Dan dia sendiri mengaku sudah terlibat aktif dalam penyelamatan penyu belimbing yang habitatnya masih terbatas di Pantai Jamursba Medi di Kabupaten Tambrau, Papua Barat dan di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera.

“Penyu belimbing itu populasinya sekarang sudah di bawah 2000-an ekor. Itu berbeda dengan beberapa dekade lalu yang masih diatas 8.000-an ekor. Kami berupaya untuk menjaga populasi yang ada sekarang,” papar dia.

Semakin langkanya penyu belimbing yang merupakan spesies penyu terbesar saat ini, menurut Dwi, diakibatkan karena masih terjadinya perburuan telur penyu oleh masyarakat sekitar pesisir pantai dan atau terjadinya ketidaksengajaan tertangkap oleh alat tangkap kapal. ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tulisan diambil dari Mongabay Indonesia dan dapat dibaca pada link www.mongabay.co.id/2018/02/05/pelindung-penyu-dari-kepunahan-itu-bernama-taman-pesisir-jeen-womom/



Petani & Pemangku Kepentingan Bersama Membahas Solusi Keberlanjutan Rumput Laut Melalui Koperasi *Farmers & Officials Discuss Sustainable Seaweed Solutions Through Co-operatives*

Tepat 1 Februari, 2018, Koperasi Akuakultur dari kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Luwu Utara, dan Takalar hadir bersama-sama dalam “Stakeholders Consultation Meeting” bertempat di Hotel Melia Makassar pada pukul 9:00 – 12:30. Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan ruang kepada koperasi untuk bertemu dengan pemerintah terkait di Sulawesi Selatan, saling bertukar gagasan dan

On February 1, 2018, aquaculture co-operatives from Bantaeng, Jeneponto, North Luwu, and Takalar regencies come together for a “Stakeholders Consultation Meeting” at Melia Hotel Makassar from 9:00 a.m – 12:30. The Stakeholders Consultation Meeting will provide an avenue for co-operatives to meet with relevant South Sulawesi government officials and share their ideas and experiences in

Ketua Kospemindo, Arman Arfah dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. H. Zulkaf S. Latief, MM bersama Gioconda Ortega-Alarie, Acting Director of Programs – CDF Kanada.

Chairman of Kospemindo, Arman Arfah, Head of Marine and Fisheries Agency, South Sulawesi Province, Ir. H. Zulkaf S. Latief, MM and Gioconda Ortega-Alarie, Acting Director of Programs – CDF Canada.

Foto/Photo: **INVEST Co-op Indonesia**

pengalaman dalam mengatasi tantangan dan perbaikan praktik-praktik yang dapat mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup petani melalui koperasi di bawah naungan proyek INVEST Co-op Indonesia.

Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari Dinas Provinsi (Kelautan dan Perikanan, Koperasi, Perindustrian & Perdagangan, Bappeda) serta perwakilan dari Dinas Kelautan & Perikanan dan Dinas Koperasi dari empat Kabupaten; Bantaeng, Jeneponto, Luwu Utara dan Takalar, serta turut hadir Pusat Pengembangan Budidaya Air Payau Takalar. Perwakilan dari CDF Kanada, Institut Perikanan dan Kelautan Memorial University of Newfoundland Kanada, beserta Kospemindo selaku mitra pelaksana proyek di Indonesia, akan berkesempatan untuk saling konsultasi dan berkolaborasi.

Proyek INVEST Co-op Indonesia adalah proyek empat tahun (2016-2019) yang bertujuan untuk menguatkan posisi petani pembudidaya rumput laut, bandeng, dan udang (SMS) di Sulawesi Selatan melalui model usaha koperasi yang terintegrasi. Proyek ini memperkenalkan praktik-praktik budidaya yang tangguh terhadap perubahan iklim, penguatan untuk peningkatan kualitas dan produksi, membangun kapasitas koperasi dan anggotanya, meningkatkan akses ke institusi keuangan, serta membangun koperasi dengan bisnis yang menguntungkan, berkelanjutan dan memberikan peluang setara bagi perempuan dan laki-laki. Proyek ini terlaksana atas pendanaan dari Pemerintah Kanada (melalui *Global Affairs Canada*) dengan kontribusi dari *Co-operative Development Foundation of Canada* (CDF Canada). ●

overcoming challenges and improving practices for increased production and better livelihoods through co-operatives under the INVEST Co-op Indonesia project.

Representatives comes from the heads of provincial agencies (Marine and Fisheries, Co-operatives, Industry, and Planning and Development), the representatives from the Marine and Fisheries and Co-operatives agencies from Bantaeng, Jeneponto, North Luwu, and Takalar regencies, and Brackishwater Aquaculture Development Centre. CDF Canada, the Fisheries and Marine Institute of Memorial University of Newfoundland, and Kospemindo - the project's local partner- will be on hand for a unique opportunity for consultation and collaboration.

The INVEST Co-op Indonesia project is a four-year project (2016-2019) aimed at strengthening the position of aquaculture producers of seaweed, milkfish, and shrimp (SMS) in the South Sulawesi region through the integrated co-operative business model. The Project is introducing aquaculture practices that are resilient to climate change and increase quality and yield of production, building the capacity of co-operatives and their members, improving access to financial services, and enabling co-operatives to run profitable, sustainable, and gender-equitable businesses. The Project is made possible with funding from the Government of Canada (through Global Affairs Canada) with contributions from the Co-operative Development Foundation of Canada (CDF Canada). ●

INFORMASI LEBIH LANJUT

Hubungi Ms. Herliani, Koordinator Proyek, INVEST Co-op Indonesia, Jl. Anggrek Raya Blok E2 No. 24, Makassar, South Sulawesi. Email : herliani.invest@gmail.com

Artikel

Sekulum Senyum Harapan dari Seguling



Seperti biasa, semua berawal dari Kiat Guru, saya ditempatkan untuk berproses di salah satu kecamatan di Kabupaten Ketapang. Letaknya di peta berada pada titik ujung atau perbatasan dari Kabupaten ini yaitu Kecamatan Manis Mata. Itu nama yg selalu terngiang di telinga saya, dari tujuh desa yang mendapat program Kiat Guru, lima desanya menjadi tempat dimana saya berproses dengan pemangku kepentingan desa, guru, orangtua, dan anak-anak. Tetapi bukan itu saja, saya juga mendapat bonus berproses dengan alam, medan, dan semua hal yang ada di sini.

<http://www.batukarinfo.com/kiat-guru/cerita-lapangan/sekulum-senyum-harapan-dari-seguling>

Mengarungi Samudera Pelayanan Publik: Sebuah Pedoman Penyusunan Konsep Desain Layanan - Pembelajaran dari Pasikola



Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Makassar meminta dukungan UNDP untuk mendorong orang memakai sistem transportasi umum dan mengurangi kemacetan lalu lintas. UNDP berkolaborasi dengan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan Pulse Lab Jakarta dalam pengagasan sebuah prakarsa untuk menjawab permintaan tersebut.

Pedoman ini berisi temuan dan pembelajaran dari prakarsa tersebut, Prakarsa ini merupakan bagian dari program City-I-LEAPS (City Innovation through Learning, Exchanging, Adapting, Prototyping and Scaling) sebuah kemitraan pertukaran pengetahuan dan bantuan teknis melalui Innovation Exchange Network yang dibentuk oleh Pemerintah Metropolitan Seoul dan Biro Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik. City-I-LEAPS bertujuan mengubah pertukaran pengetahuan tradisional melalui penggunaan rancangan reka cipta (design thinking) dan reverse engineering; mengusulkan solusi yang memenuhi kebutuhan.

<http://www.batukarinfo.com/referensi/toolkit-penyusunan-desain-pelayanan-publik-belajar-dari-proses-pasikola>

ADB Mendukung Transformasi Teknologi di Indonesia

Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui \$750.000 kepada Indonesia untuk memberikan dukungan pengetahuan dan bantuan teknis guna mempelajari dampak teknologi disruptif terhadap prospek pembangunan di Indonesia.

Potensi manfaat ekonomi digital bagi Indonesia diperkirakan akan cukup besar. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan pengguna Internet tercepat di dunia. Berbagai indikator seperti lalu lintas internet, pendapatan dari layanan komputasi awan dan sistem terkait (*Internet of Things*) tumbuh pesat.

<http://www.batukarinfo.com/node/34285>

Peningkatan Mutu Pendidikan di Daerah Miskin dan Terpencil Indonesia

Di Indonesia, satu dari lima guru tidak hadir di sekolah. Proyek percontohan Kiat Guru memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk memperbaiki tingkat kehadiran guru, kinerja pelayanan guru, dan hasil pembelajaran murid. Evaluasi dampak dilakukan di 270 desa tertinggal, memperbaiki kapasitas 1.800 wakil masyarakat dan akuntabilitas 1.700 guru. Mereka melayani sekitar 26.000 murid sekolah dasar.

<http://www.batukarinfo.com/kiat-guru/news/peningkatan-mutu-pendidikan-di-daerah-miskin-dan-terpencil-indonesia-0>



PENCARIAN PRAKTIK CERDAS 2018!



Yayasan BaKTI kembali mengajak individu, lembaga, kelompok masyarakat, pemerintah daerah, program mitra pembangunan, siapa saja untuk bergabung dalam pencarian Praktik Cerdas 2018 untuk dipresentasikan dalam **Festival Forum Kawasan Timur Indonesia VIII.**

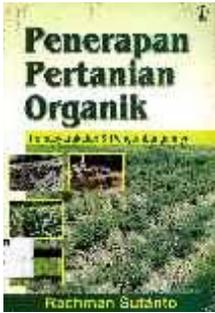
Praktik Cerdas adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan berhasil menjawab tantangan pembangunan di sekitar kita.

Untuk bisa disebut Praktik Cerdas, BaKTI menggunakan 6 kriteria: **inovatif, berdampak nyata, partisipatif, berkelanjutan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender.**

Bila Anda sedang mengerjakan sebuah inisiatif yang berhasil menjawab tantangan pembangunan di daerah Anda, atau mengetahui kegiatan keren yang menginspirasi, nominasikan kegiatan tersebut sebagai **Praktik Cerdas 2018!**

Unduh formulir praktik cerdas di <http://bit.ly/praktikcerdasBaKTI> dan kirimkan via email ke info@bakti.or.id **paling lambat tanggal 30 April 2018.**

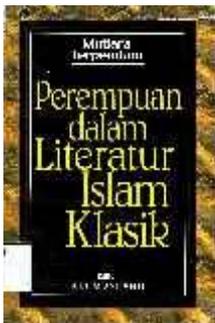
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai praktik cerdas silakan mengunjungi <http://praktikcerdas.bakti.or.id>



Penerapan Pertanian Organik; Permasyarakatan dan Pengembangannya

PENULIS Rachman Sutanto

Pertanian organik yang akrab lingkungan dan menghasilkan pangan yang sehat (bebas dari obat-obatan dan zat-zat kimia yang mematikan) sebenarnya sudah menjadi kearifan/pengetahuan tradisional (indigenous knowledge) yang membudaya di kalangan kaum tani. Namun, teknologi pertanian organik ini mulai ditinggalkan oleh petani ketika teknologi intensifikasi yang mengandalkan bahan agrokimia diterapkan di bidang pertanian. Buku ini mengetengahkan teknologi pertanian organik yang dapat diadopsi oleh para petani, pengembangan dan pemasyarakatannya, dengan memperhatikan sumber daya spesifik yang tersedia di lingkungannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pertanian organik tersebut dapat dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan dan memasyarakatkan kegiatan pertanian berkelanjutan dalam lingkup yang lebih luas.



Perempuan dalam Literatur Islam Klasik

PENULIS Alai Najib, dkk

Isu-isu di sekitar Islam dan relasi gender dewasa ini menjadi topik yang sering diperdebatkan. Di satu sisi, banyak kalangan memahami bahwa Islam menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Islam juga dianggap telah memberikan perlakuan-perlakuan istimewa kepada laki-laki dalam hak-hak individual dan sosial yang tidak diberikan kepada perempuan. Tetapi di pihak lain, banyak juga kalangan yang mencoba memberi tafsiran serba positif melalui ayat-ayat Al-Quran, hadis, Nabi, dan pemikiran ulama tentang kedudukan perempuan. Selain pembahasannya yang bersifat menyeluruh, salah satu kekuatan buku ini adalah karena para penulisnya merupakan sarjana dan peneliti yang fokus di bidangnya masing-masing, sehingga validitas dan akuntabilitias datanya tidak perlu diragukan.



Ceritalah Indonesia

PENULIS Karim Raslan

Debut Gus Dur, Islam Liberal vs Islam Literal, kerusuhan Maluku, kemenangan SBY, penahanan Bibit dan Chandra, diskriminasi etnis Tionghoa. Seperti apakah kiranya Indonesia pasca-Soeharto? Akankah negara kesatuan Indonesia mampu bertahan dan bersaing di arena global? Dalam Ceritalah Indonesia, Karim Raslan, intelektual Malaysia sekaligus penulis bereputasi internasional, bercerita tentang Indonesia setelah kejatuhan rezim Soeharto. Berbeda dari kebanyakan kolumnis, ia mengangkat suara-suara lirih dari pelipir Nusantara-di kedai-kedai kopi di Tung Tau, di pedesaan di Lintau. Karim pun dengan jernih dan jenaka menyuarakan kisah mereka yang tak terdengar.



Menidurkan Cinta

PENULIS Ahyar Anwar

Membicarakan cinta terkait dengan cara artikulasi kita. Dalam buku ini terserak begitu banyak kata tentang cinta, dan semua hanyalah pilihan-pilihan refleksi, apa yang sesungguhnya dapat kita miliki, ada dalam diri, atau mengendap dalam kenangan. Maka buku ini dapat saja penuh kisah tentang sejarah; kisah yang masih dan sedang terjadi, atau tentang sesuatu yang kelak akan menghampiri kita.